

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya berupa kesehatan, ilmu pengetahuan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palopo”**.

Adapun tujuan dari proposal penelitian ini adalah untuk memperoleh gelar Strata-1 Sarjana Ekonomi dan Bisnis. Skripsi ini disusun dengan usaha, kerja keras dan ketekunan penulis. Alhamdulillah, berkat bimbingan dari berbagai pihak termasuk kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Kasnadi dan Ibu Hasna berkat doa-doa yang terlantunkan, dukungan moral dan material serta motivasi bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa. Tak hanya itu, melalui kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Suhardi M. Anwar, Drs., M.M., CIQaR, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palopo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menjadi salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo.
2. Bapak Dr. Antong, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo dan Ibu Sri Wahyuni Mustafa, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Palopo beserta stafnya yang telah memberikan izin dan persetujuan kepada penulis

untuk melakukan penelitian sehingga skripsi dapat diselesaikan di waktu yang tepat.

3. Ibu Zikra Supri, S.E., M.Si., Ak., CPIA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak A. Dahri Adi Patra LS, S.E.,M.Si selaku pembimbing I dan bapak Saharuddin, S.E., M.M selaku pembimbing II, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan motivasi, saran dan arahan yang membangun kepada penulis dari awal hingga selesainya penelitian.
5. Bapak A. Dahri Adi Patra LS, S.E., M.Si selaku Penguji I, ibu Zikra Supri,S.E., M.Si., CPIA selaku penguji II dan ibu Riyanti S.E., M.Ak selaku Penguji III, yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun demi hasil karya ilmiah yang sempurna.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi yang telah memberikan banyak ilmunya yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal perkuliahan sampai selesainya tugas akhir ini.
7. Terkhusus kepada pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan banyak informasi dan ilmu selama penelitian.

8. Teruntuk sahabat-sahabatku di kampus, yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta memberikan motivasi dan dukungannya yang tulus kepada penulis.
9. Dan seluruh pihak yang turut membantu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif bagi para pembaca ataupun bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Palopo, September 2023

RAHMI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Manfaat Teoritis	4
1.4.2 Manfaat Praktis	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Kejelasan Sasaran Anggaran.....	6

2.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	11
2.2 Penelitian Terdahulu.....	14
2.3 Kerangka Teori	17
2.4 Kerangka Konseptual	18
2.5 Pengembangan Hipotesis	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Desain Penelitian	19
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	19
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	19
3.3.1 Populasi	19
3.3.2 Sampel	20
3.4 Jenis dan Sumber Data	20
3.4.1 Jenis Data.....	20
3.4.2 Sumber Data	20
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	21
3.7 Instrumen Penelitian.....	22
3.7.1 Uji Validitas.....	22
3.7.2 Uji Reliabilitas.....	23
3.7.3 Observasi	24
3.7.4 Kuesioner.....	24
3.8 Analisis Data	25
3.8.1 Analisis Regresi Sederhana	25
3.8.2 Pengujian Hipotesis	26
3.8.3 Koefisien Determinasi (R ²).....	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
4.2. Hasil Penelitian.....	33
4.3 Pembahasan.....	45
BAB V PENUTUP.....	48
5.1 Simpulan	48
5.2 Keterbatasan Penelitian	48
5.3 Implikasi	48
5.4 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	22
Tabel 3. 2 Skala Likert.....	25
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	33
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	33
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	34
Tabel 4. 4 Hasil Statistik Deskriptif.....	39
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Kejelasan Sasaran Anggaran (X).....	40
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y).....	40
Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran	41
Tabel 4. 8 Hasil Uji Determinasi (Model Summary).....	42
Tabel 4. 9 Interpretasi Nilai R.....	42
Tabel 4. 10 Hasil Uji Anova	43
Tabel 4. 11 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana.....	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Teori.....	18

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas ...	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 3 Deskripsi Statistik.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 4 Hasil Uji F, Uji T dan Uji Korelasi Determinasi	Error! Bookmark not defined.

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kantor BPKAD Kota Palopo. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan BPKAD Kota Palopo. Hal ini dapat dilihat pada pengujian hipotesis pada uji t yang dilakukan menunjukkan nilai signifikan variabel kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu $0,000 < \alpha = 0,005$. Adapun nilai koefisien regresi pada variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,561 dan bernilai positif. Nilai koefisien regresi menunjukkan hubungan yang positif dan searah.

Kata Kunci : Akuntabilitas, aset daerah, kejelasan sasaran anggaran, pengelolaan keuangan

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the clarity of budget targets on the accountability of regional financial management at the BPKAD Office of Palopo City. The data analysis method used is simple linear regression analysis. The results of the study show that the clarity of budget targets affects the accountability of the financial management of the Palopo City BPKAD. This can be seen in the hypothesis testing in the t-test which shows a significant value of the variable clarity of budget targets on financial management accountability, namely $0.000 < \alpha = 0.005$. The value of the regression coefficient on the variable clarity of budget targets is 0.561 and has a positive value. The regression coefficient value shows a positive and unidirectional relationship.

Keywords: Accountability, regional assets, clarity of budget targets, financial management

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas di pemerintahan sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam konsep pemerintahan yang baik akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, maka nilai akuntabilitas sangatlah penting diadopsi dalam mengelola pemerintahan. Hal ini didasarkan pada argumen, bahwa tidak ada suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Anggaran merupakan suatu aspek terpenting dalam menyusun rencana dan misi secara sistematis pada periode yang sudah ditentukan. Anggaran memiliki posisi yang penting dalam pengendalian manajemen sebagai informasi perencanaan keuangan agar dapat mengevaluasi kinerja para pegawai atau aparat negara. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan membantu

kinerja manajerial. Kejelasan sasaran anggaran tersebut akan memudahkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas oleh instansi pemerintah dalam mencapai tujuan instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran tersebut dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan dan harus dipertanggungjawabkan oleh negara secara transparan (Hasanah, 2021).

Peran anggaran sangat penting dalam lingkup pemerintahan terutama dalam akuntabilitasnya. Hal ini sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kenis terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan anggaran. *Goal Setting Theory* menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang jelas dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan prestasi kerja, semakin jelas sasaran anggarannya maka akuntabilitas kinerjanya akan semakin baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Zakiyudin (2015), dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan (Hasanah, 2021).

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Penyajian laporan keuangan merupakan pengungkapan atas informasi yang menjadi suatu elemen dasar dari akuntabilitas. Penyajian laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan

keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan sebagai suatu informasi, laporan keuangan juga sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban serta dapat menggambarkan indikator kesuksesan suatu organisasi/perusahaan untuk mencapai tujuannya (Nurfadilah, 2022)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo merupakan salah satu entitas pelaporan yang diwajibkan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk itu, peneliti ingin mengetahui apakah penyajian laporan keuangan dan juga kejelasan sasaran anggaran di BPKAD memiliki hubungan atau berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kota Palopo. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palopo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah di jelaskan pada bagian latar belakang, maka permasalahan yang di rumuskan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kantor BPKAD Kota Palopo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kantor BPKAD Kota Palopo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi akademisi, penelitian ini menambah wawasan tentang pengaruh dari kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
2. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan di bidang sektor publik, agar dapat mengetahui apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kantor BPKAD Kota Palopo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi dan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah atau daerah agar dapat memahami pentingnya kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan juga menambah wawasan mengenai kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Dari uraian di atas, penulisan ini lebih difokuskan mengenai kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kota Palopo.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini terdiri atas lima bab. Pertama yaitu pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, serta sistematika penulisan. Kedua, yaitu tinjauan pustaka yang menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka teori, kerangka konseptual serta pengembangan hipotesis pada penelitian. Ketiga, yaitu metode penelitian yang berisi tentang desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian, dan analisis data. Keempat, yaitu hasil dan pembahasan yang berisi hasil penelitian yang memuat hasil-hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian, serta pembahasan yang berisi pembahasan dari hasil-hasil data penelitian yang telah diperoleh. Kelima, yaitu penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian, dimana kesimpulan merupakan paragraph yang singkat, padat dan jelas. Selain itu bab ini juga memuat keterbatasan yang diperoleh dalam penelitian, implikasi penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan kepada beberapa pihak seperti kepada instansi, peneliti serta kepada peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Adapun landasan teori pada penelitian ini terdiri dari kejelasan sasaran anggaran, penyajian laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut.

2.1.1 Kejelasan Sasaran Anggaran

Adapun landasan teori mengenai kejelasan sasaran anggaran terdiri atas pengertian kejelasan sasaran anggaran, karakteristik anggaran dan indikator kejelasan sasaran anggaran. Berikut penulis jelaskan lebih rinci dibawah ini.

a. Pengertian Kejelasan Sasaran Anggaran

Perencanaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses manajemen organisasi. Demikian juga, anggaran mempunyai posisi sangat penting. Anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Pemikiran strategis di setiap organisasi adalah proses dimana manajemen berpikir tentang pengintegrasian aktivitas ke arah tujuan organisasi. Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi, dan ekonomi eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun strategi. Pemikiran strategis manajemen didokumentasikan dalam berbagai dokumen perencanaan. Keseluruhan proses diintegrasikan dalam prosedur penganggaran organisasi.

Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Didalam tampilannya, anggaran selalu menyertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu.

Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun oleh manajemen dalam jangka waktu tertentu untuk mengungkapkan penerimaan dan pengeluaran secara rinci dalam suatu proyek (Hasanah, 2021)

Menurut Kenis kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Pengelolaan keuangan pemerintah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya yang tepat agar tercapainya kinerja yang baik dan menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Anggaran memiliki posisi yang penting dalam pengendalian manajemen sebagai informasi perencanaan keuangan agar dapat mengevaluasi kinerja para pegawai atau aparat Negara (Hasanah, 2021).

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Suhartono dan Solihin, 2011). Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun, oleh karena itu kejelasan sasaran anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran adalah rencana kegiatan yang dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang terutang secara kuantitatif. Kejelasan sasaran anggaran merujuk pada tingkat dimana sasaran anggaran adalah dinyatakan

secara spesifik dan jelas, dan dipahami oleh pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhinya (Hasanah, 2021).

Menurut Bhakti dkk (2015), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan suatu organisasi/perusahaan ditetapkan secara jelas dan spesifik, sehingga akan mempermudah pelaksanaan anggaran dalam mempertanggungjawabkan semua program yang telah diimplementasikan. Adapun menurut Kenis, kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pegawai yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Aprilianti, 2020).

b. Karakteristik Anggaran

Tidak setiap rencana kerja organisasi dapat disebut sebagai anggaran. Karena, anggaran memiliki beberapa ciri khusus yang membedakan dengan sekedar rencana (Fitriyanti, 2016) yakni (Hawalya, 2023):

1) Dinyatakan dalam satuan moneter

Penulisan dalam satuan moneter tersebut dapat juga didukung oleh satuan kuantitatif lain, misalnya unit. Penyusunan rencana kerja dalam satuan moneter tersebut, bertujuan untuk mempermudah membaca dan usaha untuk mengerti rencana tersebut. Rencana kerja yang diwujudkan di dalam suatu cerita panjang akan menyulitkan anggota organisasi untuk membaca atau mengerti. Karena itu, sebaiknya anggaran disusun dalam bentuk kuantitatif moneter yang ringkas.

2) Umumnya mencakup kurun waktu satu tahun.

Bukan berarti anggaran tidak dapat disusun untuk kurun waktu lebih pendek, tiga bulanan misalnya atau untuk kurun waktu lebih panjang, seperti lima tahunan. Batasan waktu di dalam penyusunan anggaran akan berfungsi untuk memberikan batasan rencana kerja tersebut.

3) Mengandung komitmen manajemen.

Anggaran harus disertai dengan upaya pihak manajemen dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai apa yang telah ditetapkan. Tanpa upaya serius dari pihak manajemen untuk mencapainya maka penyusunan anggaran tidak akan banyak manfaatnya bagi perusahaan. Karena itu, di dalam menyusun anggaran perusahaan harus mempertimbangkan dengan teliti sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menjamin bahwa anggaran yang disusun adalah realistis

4) Usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksana anggaran.

Anggaran tidak dapat disusun sendiri-sendiri oleh setiap bagian organisasi tanpa persetujuan dari atasan pihak penyusun. Setelah disetujui anggaran hanya diubah jika ada keadaan khusus. Jadi, tidak setiap saat dan dalam segala keadaan anggaran boleh diubah oleh manajemen. Anggaran boleh diubah jika situasi internal dan eksternal organisasi memaksa untuk mengubah anggaran tersebut. Perubahan asumsi internal dan eksternal memaksa untuk mengubah anggaran karena jika dipertahankan malah membuat anggaran tidak relevan lagi dengan situasi yang ada.

5) Jika terjadi penyimpangan/varian didalam pelaksanaannya, harus dianalisis sebab terjadinya penyimpangan tersebut.

Karena, tanpa ada analisis yang lebih mendalam tentang penyimpangan tersebut maka potensi untuk terulang lagi di masa mendatang menjadi besar. Tujuan analisis penyimpangan tersebut adalah untuk mencari penyebab penyimpangan, supaya tidak terulang lagi di masa mendatang dan agar penyusunan anggaran dikemudian hari menjadi lebih relevan dengan situasi yang ada (Hawalya, 2023).

c. Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran

Tujuan dan sasaran anggaran harus disesuaikan dengan lima indikator sebagai berikut (Hasanah, 2021) :

1) Spesifik

Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus memberikan kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya.

2) Terukur

Sasaran harus menyatakan dalam satuan ukuran tertentu sehingga memudahkan penilaian tingkat pencapaiannya. Meliputi: perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, evaluasi, pemantauan, dan pengendalian.

3) Menantang Tapi Realistis

Sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai. Meliputi: luas daerah pemasaran yang ingin dicapai, market share yang ingin dimiliki.

4) Berorientasi pada hasil akhir

Sasaran harus difokuskan pada hasil atau pengaruh akhir yang akan dicapai bukan pada proses atau cara mencapainya. Meliputi: sasaran program yang telah ditetapkan dan evaluasi terhadap kesulitasn sasaran yang dicapai.

5) Memiliki batas waktu

Sasaran sebaiknya menentukan secara jelas kapan hasil atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut akan dicapai. Meliputi: program kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran anggaran yang dibuat dan program harus disertai target sasaran output dan *outcome*.

2.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Adapun landasan teori mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan terdiri atas pengertian dan konsep akuntabilitas pengelolaan keuangan dan indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan.

a. Pengertian dan Konsep Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung- jawaban, serta pengawasan harus benar- benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Menurut LAN dalam Akuntabilitas dan Good Governance (2000), akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban

mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agent yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 (Pasal 1), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Bila dilihat dari ruang lingkupnya, keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya. Kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah meliputi APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya meliputi badan-badan usaha milik daerah (Hasan, 2017).

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas

pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Hasan, 2017).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan tingkat pertanggungjawaban pengelolaan daerah yang bersifat komprehensif/luas dan mencakup aspek kebijakan serta penggunaan anggaran kepada publik. Instrument utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu anggaran pemerintah, laporan tahunan, data secara periodic yang dipublikasikan dan hasil dari investigasi dan laporan umum lainnya (Vidyasari, 2021).

b. Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Adapun indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu sebagai berikut (Asliyanti, 2015)

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum, yaitu akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik
- 2) Akuntabilitas proses, yaitu terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan public yang cepat, responsive dan murah biaya.
- 3) Akuntabilitas Program yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal
- 4) Akuntabilitas Kebijakan yaitu terkait dengan pertanggungjawaban Pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian>Nama Peneliti/Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas	Kuantitatif	Hasil dari hipotesis uji parsial menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja

	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan)/Atikah Hasanah/2021		Instansi Pemerintah sedangkan Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Pengendalian Akuntansi tidak tergantung pada penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil dari hipotesis uji simultan menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan (Hasanah, 2021).
2.	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)/Muhammad Hafzhan/2021	Kuantitatif	Hasil penelitian dari hipotesis uji simultan dengan angka signifikan 5% dengan Fhitung sebesar 3,322 dan Ftabel sebesar 2,87 ditunjukkan Fhitung > Ftabel menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan).

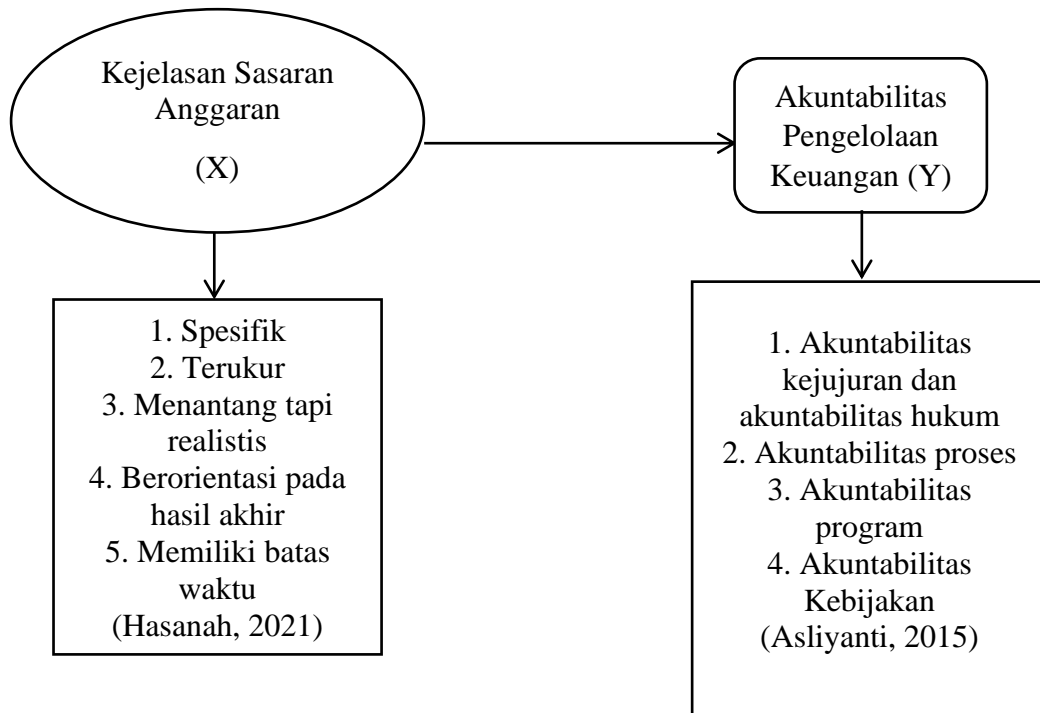
3.	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya/Nabila Ayu Indria/2018	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, serta penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah kabupaten Tasikmalaya (Indria, 2018)
4.	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipatif Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak)/Nina Sumarni/2019	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, dapat dilihat dari hasil pengolahan SPSS diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ 5,435 > 2,040 maka H_1 diterima. (2) partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial dapat dilihat nilai t_{hitung} sebesar $t_{hitung} < t_{tabel}$ 3,330 < 2,040 maka H_2 diterima. (3) akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial dapat dilihat t_{hitung} $t_{hitung} < t_{tabel}$ 2,504 < 2,040 maka H_3 diterima. (4) Sedangkan secara simultan ketiga variable bebas kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial dapat dilihat dari hasil SPSS $F_{hitung} > F_{tabel}$ 30,204 > 2,91 maka H_4 diterima. Dari hasil R^2 diperoleh sebesar 72,0% sedangkan sisanya 28,0% dipengaruhi oleh variable lain (Sumarni, 2019).

5.	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Transparansi Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Klaten/Naommy Yithalak El Gibor/2021	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Transparansi publik berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Gibor, 2021) .
----	--	-------------	--

2.3 Kerangka Teori

Kerangka teori yaitu pola yang menjelaskan, menggambarkan maupun mengungkapkan mengenai kejelasan sasaran anggaran, penyajian laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Adapun pokok masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu variabel kejelasan sasaran anggaran (X) yang merupakan variabel independen dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) yang merupakan variabel dependen.

Sesuai dengan indikator dari masing-masing variabel, maka peneliti akan menyebarkan kuesioner penelitian, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis. Hasil analisis data kemudian akan dibahas dan akhirnya akan menghasilkan kesimpulan dan saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Berikut kerangka teori pada penelitian ini.



Gambar 2. 1 Kerangka Teori

2.4 Kerangka Konseptual

Anggaran memiliki posisi yang penting dalam penyajian laporan keuangan sebagai informasi dan juga anggaran memiliki peran penting dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sehingga suatu anggaran harus jelas sasarannya kemana. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran diharapkan dapat mendorong para pegawai ataupun aparat pemerintah untuk meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja sehingga terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik.

2.5 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang kebenarannya perlu untuk diuji serta dibuktikan melalui riset penelitian. Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019:16) penelitian kuantitatif adalah diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat psitivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2019:17). Penelitian ini menguji pengaruh variable bebas yaitu kejelasan sasaran anggaran (X) terhadap variabel terikat (Y) yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan. Adapun jenis penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif, dimana menurut Sugiyono (2019:357) analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019:357).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo yang terletak di Jalan Andi Djemma No. 139, Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2023.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2019:126) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Adapun populasi pada penelitian ini yaitu pegawai Kantor BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Palopo.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2019:62) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2019). Menurut Arikunto, apabila populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan. Pada penelitian ini, jumlah sampel yaitu sebanyak 75 responden.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019:17) penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.

3.4.2 Sumber Data

Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, diperlukan data yang *valid* dan *reliable* agar hasil yang didapat mengandung kebenaran. Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu berupa data primer. Menurut Sugiyono (2019:194) data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya data yang dipilih dari responden melalui kuesioner atau data hasil wawancara peneliti dengan sumber. Adapun data primer pada penelitian ini yaitu data yang

diperoleh langsung dari responden itu sendiri yaitu pegawai BPKAD Kota Palopo.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019:296) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik kuesioner yang dibagikan kepada responden.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, atau obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019).

Pada penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Menurut Sugiyono (2019:69) variabel independen atau variable bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sedangkan variabel dependen atau variable terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019).

Pada penelitian ini, variabel bebas (X) yaitu kejelasan sasaran anggaran. Sedangkan variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y).

3.6.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel dari penelitian ini disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator Penelitian
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y)	Akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya (Hasan, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum 2. Akuntabilitas proses 3. Akuntabilitas program 4. Akuntabilitas kebijakan (Asliyanti, 2015)
2.	Kejelasan Sasaran Anggaran (X)	Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Hasanah, 2021)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spesifik 2. Terukur 3. Menantang tapi realistis 4. Berorientasi pada hasil akhir 5. Memiliki batas waktu (Hasanah, 2021)

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

3.7.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2019:175) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Instrument yang valid berarti alat ukur yang

digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.

Langkah uji validitas kuesioner adalah sebagai berikut (Umar, 2019:63):

1. Kuesioner yang sudah dirancang diisi oleh minimal 30 responden agar distribusi skor (nilai) mendekati kurva normal.
2. Menghitung nilai koefisien korelasi antardata pada masing-masing pertanyaan atau pernyataan dengan skor total yang telah dikurangi dengan data pertanyaan atau pernyataan.

Teknik korelasi yang digunakan adalah korelasi *Product Moment*, yaitu membandingkan hasil probabilitas koefisien korelasi $r(xy)$ dengan taraf signifikan 5 % atau (0,05) (Yudianto, 2021:108-109).

3.7.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2019:176) hasil penelitian yang reliable bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrument yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.

Teknik yang digunakan pada pengukuran reliabilitas ini adalah menggunakan teknik *Cronbach Alpha* yaitu uji koefisien terhadap skor jawaban responden yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian. Jika varian dan kovarian dari komponen-komponen tidak sama maka tidak dapat menghilangkan satu dengan yang lainnya. Pada penelitian uji reliabilitas

yang digunakan yaitu menggunakan alat ukur dengan teknik *Alpha Cronbach* (Yudianto, 2021:109).

Penelitian ini menggunakan teknik Alpha Cronbach untuk menguji setiap butiran pertanyaan agar dapat dipercaya dan digunakan dalam angket. Suatu variabel dikatakan reliabel, apabila hasil $\alpha > 0,60$ = reliabel dan hasil $\alpha < 0,60$ = tidak reliabel. Adapun taraf signifikannya adalah 95% maka butiran pertanyaan dinyatakan reliabel, maksudnya yaitu untuk mencari data yang benar, maka penulis menggunakan taraf kesalahan sebesar 5% (Yudianto, 2021:109).

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,2016:41). Suatu variabel dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* > 0.6 .

3.7.3 Observasi

Menurut Sugiyono (2019:145) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan ingatan. Adapun observasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui fenomena masalah.

3.7.4 Kuesioner

Menurut Sugiyono (2019:142) kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Penelitian ini menguji dengan menggunakan kuesioner pada *skala likert* dalam pengukuran variabel bebas dan variabel terikat. Menurut Sugiyono (2019:146) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Berikut ini penentuan skor pada skala likert.

Tabel 3. 2 Skala Likert

Jawaban	Kode	Skor
Sangat Setuju	SS	5
Setuju	S	4
Netral	N	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

Sumber : Sugiyono (2019:146)

3.8 Analisis Data

3.8.1 Analisis Regresi Sederhana

Penelitian ini menggunakan analisis Regresi Sederhana dengan pengolahan data menggunakan SPSS 23 *for Windows*. Menurut Sugiyono (2017:275), analisis regresi adalah analisis yang digunakan untuk membuat keputusan apakah naik dan menurunnya variabel dependent dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independent atau tidak. Analisis regresi linier sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas. Analisis regresi linier sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akutabilitas pengelolaan keuangan di Kantor BPKAD Kota Palopo. Menurut Sugiyono (2019:275) persamaan regresi linier sederhana yang ditetapkan adalah:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

α = Konstanta

b = Koefisien regresi

X = Kejelasan sasaran anggaran

3.8.2 Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:99) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Analisis ini untuk mengetahui pengaruh antar variabel independent dan variabel dependent apakah masing-masing variabel dependent berpengaruh positif atau negatif sehingga hipotesis tersebut perlu diuji.

Menurut Sugiyono, uji t (t-test) melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variable independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variable independen lain dianggap konstan.

Langkah untuk uji t adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan hipotesis yang akan diuji. Hipotesis yang akan diuji yaitu

(Nanincova, 2019:3-4):

$H_0 : \beta_i = 0$, artinya variabel bebas tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat.

H1 : $\beta_i \neq 0$, artinya variabel bebas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat.

2. Menentukan tingkat signifikansi = α sebesar 0,05.

3. Menentukan daerah keputusan:

- a. Apabila $t_{sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial kejelasan sasaran anggaran (X) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y) di Kantor BPKAD Kota Palopo.
- b. Apabila $t_{sig} > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya secara parsial kejelasan sasaran anggaran (X) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y) di Kantor BPKAD Kota Palopo

3.8.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Sugiyono (2017), koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dapat menjelaskan variable terikat. Nilai koefisien determinasi berada pada rentang angka nol (0) dan satu (1).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo

a. Pembentukan

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo dibentuk dengan pertimbangan agar pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan, penyelenggaraan penatausahaan keuangan serta pengelolaan aset daerah dapat dilaksanakan lebih optimal dengan mengacu pada seluruh potensi sumber daya yang terdapat di Kota Palopo. Sejak Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan selanjutnya ditindak lanjuti tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 serta Peraturan Walikota Palopo Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo.

b. Kedudukan dan Tupoksi

1) Kedudukan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

2) Tugas dan Fungsi (Tupoksi)

Secara umum Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sedangkan berdasarkan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan:

- a) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b) Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- c) Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan fungsional di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d) Pengekoordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

c. Visi dan Misi

1) Visi:

Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Palopo, maka ditetapkan visi organisasi yaitu “Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah professional dan berkualitas”.

2) Misi:

Untuk menetapkan visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo ditetapkan tiga misi yaitu :

- a) Meningkatkan kualitas dan profesional Sumber Daya Manusia (SDM) aparat pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- b) Meningkatkan kualitas sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- c) Meningkatkan profesionalisme pelayanan pengelolaan keuangan dan manajemen asset daerah

d. Tujuan dan Sasaran

1) Tujuan

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo, yaitu sebagai berikut.

- a) Mewujudkan aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memiliki wawasan kompetensi;
- b) Meningkatkan akuntabilitas laporan Keuangan dan Aset Daerah;
- c) Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Aset Daerah yang memenuhi prinsip pelayanan public.

2) Sasaran

Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo yaitu sebagai berikut.

- a) Meningkatnya dedikasi tanggung jawab, wawasan dan kompetensi aparat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b) Meningkatkan proporsi pendapatan daerah dalam pemenuhan kemandirian keuangan daerah;
- c) Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan;
- d) Terpenuhinya pengelolaan asset daerah yang teat, efisien dan efektif;

- e) Terwujudnya pelayanan pengelolaan dan manajemen asset daerah yang sederhana, jelas, aman bertanggung jawab dan mudah diakses.

e. Susunan Organisasi

1) Susunan Organisasi BPKAD, terdiri atas :

a) Kepala Badan ;

b) Sekretariat, terdiri atas :

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

(2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

c) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri atas :

(1) Subbidang Penyusunan APBD

(2) Subbidang Pengelolaan Kas dan Investasi Daerah; dan

(3) Kelompok Jabatan Fungsional

d) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :

(1) Subbidang Akuntansi;

(2) Subbidang Pelaporan dan Informasi Keuangan Daerah; dan

(3) Kelompok Jabatan Fungsional

e) Bidang Aset Daerah, terdiri atas:

(1) Subbidang Penatausahaan dan Pengamanan Aset Daerah

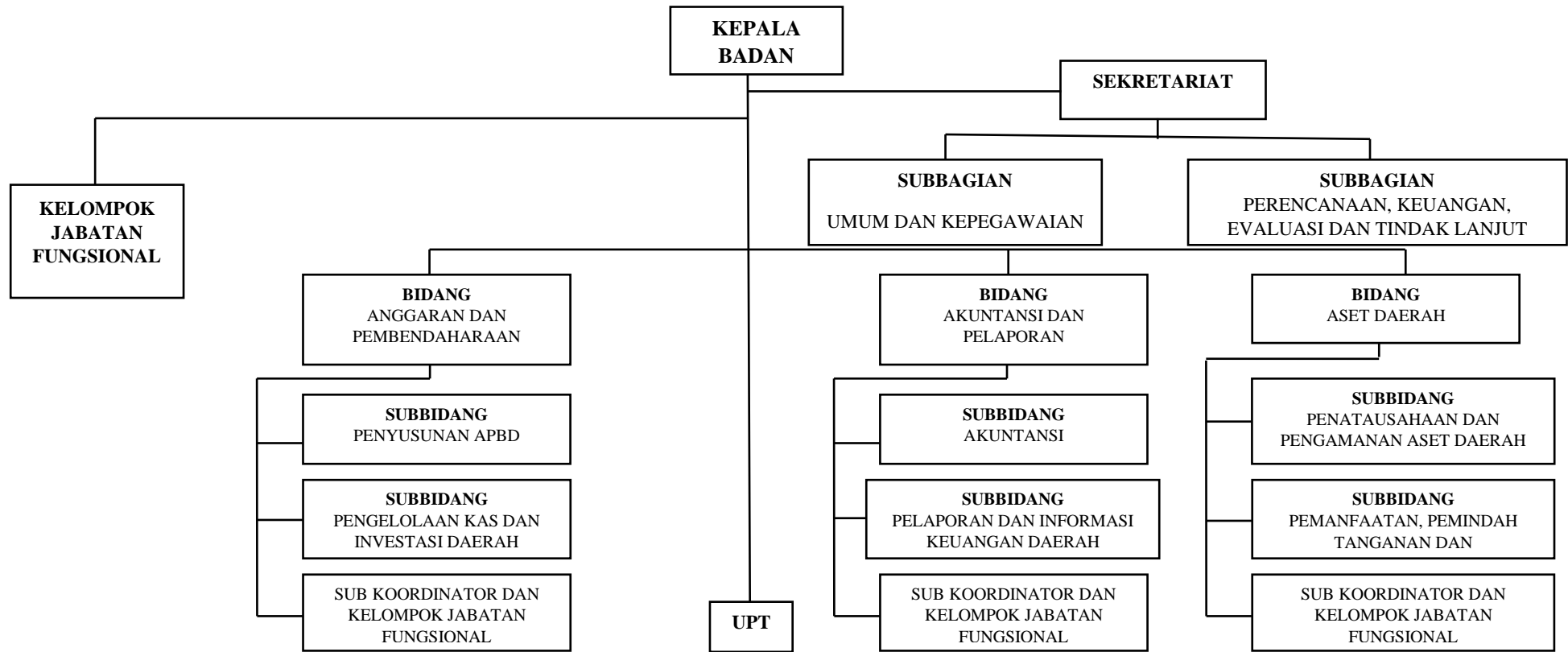
(2) Subbidang Pemanfaata, Pemindahtanganan dan Penghapusa; dan

(c) Kelompok Jabatan Fungsional

f) Kelompok Jabatan Fungsional

- ##### 2) Bagan Struktur Organisasi BPKAD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi

4.2. Hasil Penelitian

a. Karakteristik Responden

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini berupa penyebaran kuesioner kepada responden yaitu pegawai BPKAD Kota Palopo. Karakteristik pada penelitian ini digambarkan melalui jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir.

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1.	21 – 25 Tahun	4	5,33
2.	26 – 30 Tahun	6	8
3.	31 – 35 Tahun	9	12
4.	36 – 40 Tahun	24	32
5.	41 – 45 Tahun	24	32
6.	46 Tahun Keatas	8	10,67
Jumlah		75	100

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat diketahui bahwa responden dengan persentase terbesar yaitu responden yang berusia 36-40 Tahun dan 41-45 Tahun yaitu masing-masing sebanyak 24 orang dengan persentase sebesar 32%. Sedangkan responden dengan persentase terkecil yaitu responden yang berusia 21-25 Tahun yaitu sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 5,33%.

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Perempuan	45	60
2.	Laki-laki	30	40
Jumlah		75	100

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 45 orang dengan persentase sebesar 60%. Sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 30 orang dengan persentase sebesar 40%.

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1.	SMA	12	16
2.	S1	58	77,33
3.	S2	5	6,67
Jumlah		75	100

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat dilihat responden yang berpendidikan terakhirnya sampai pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebanyak 12 orang dengan persentase sebesar 16%. Responden yang berpendidikan terakhirnya sampai pada jenjang Strata-1 (S1) yaitu sebanyak 58 orang dengan persentase sebesar 77,33%. Responden yang berpendidikan terakhirnya sampai pada jenjang strata-2 (S2) yaitu sebanyak 6,67 orang dengan persentase sebesar 6,67%.

b. Deskripsi data penelitian

1. Kejelasan Sasaran Anggaran (X)

Pada pernyataan pertama variabel X yaitu terdapat kejelasan sasaran anggaran pada satuan kerja, dari 75 responden sebanyak 47 responden yang menjawab sangat setuju (SS) dengan pernyataan ini dan sebanyak 28 responden yang menjawab setuju (S). Sehingga rata-rata jawaban menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa kejelasan sasaran anggaran pada satuan kerja.

Pada pernyataan kedua variabel X yaitu kejelasan rencana kerja dan anggaran telah terdefiniskan dengan jelas dan komperhensif, dari 75 orang responden sebanyak 46 responden yang menjawab sangat setuju (SS) dengan pernyataan tersebut, sebanyak 26 responden yang menjawab setuju (S) dengan pernyataan tersebut dan sebanyak 3 responden yang menjawab netral (N) dengan pernyataan tersebut. Sehingga rata-rata jawaban menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa kejelasan rencana kerja dan anggaran telah terdefiniskan dengan jelas dan komperhensif.

Pada pernyataan ketiga variabel X yaitu dibutuhkan keahlian dan pengetahuan yang tinggi untuk mencapai sasaran anggaran, dari 75 orang responden sebanyak 44 responden yang menjawab sangat setuju (SS) dengan pernyataan tersebut, sebanyak 29 responden yang menjawab setuju (S) dengan pernyataan tersebut dan sebanyak 2 responden yang menjawab netral (N) dengan pernyataan tersebut. Sehingga rata-rata jawaban menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa dibutuhkan keahlian dan pengetahuan yang tinggi untuk mencapai sasaran anggaran.

Pada pernyataan keempat variabel X yaitu kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran merupakan salah satu faktor dominan yang mendukung tujuan-tujuan instansi secara efektif, dari 75 orang responden sebanyak 40 responden yang menjawab sangat setuju (SS) dengan pernyataan tersebut, sebanyak 32 responden yang menjawab setuju (S) dengan pernyataan tersebut dan sebanyak 3 responden yang menjawab netral (N) dengan pernyataan tersebut. Sehingga rata-rata jawaban menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran

merupakan salah satu faktor dominan yang mendukung tujuan-tujuan instansi secara efektif.

Pada pernyataan kelima variabel X yaitu antara penganggaran dengan pelaksanaan/realisasinya telah tepat sasaran yang nantinya digunakan untuk mencapai tujuan instansi secara efektif, dari 75 orang responden sebanyak 37 responden yang menjawab sangat setuju (SS) dengan pernyataan tersebut, sebanyak 35 responden yang menjawab setuju (S) dengan pernyataan tersebut dan sebanyak 3 responden yang menjawab netral (N) dengan pernyataan tersebut. Sehingga rata-rata jawaban menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa antara penganggaran dengan pelaksanaan/realisasinya telah tepat sasaran yang nantinya digunakan untuk mencapai tujuan instansi secara efektif.

Dari kelima pernyataan dalam kuesioner penelitian pada variabel X, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden yaitu sebanyak 75 orang responden menjawab sangat setuju (SS) dengan pernyataan dalam kuesioner penelitian yang dijawab oleh responden terkait dengan kejelasan sasaran anggaran.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y)

Pada pernyataan pertama variabel Y yaitu APBD disusun dengan pendekatan kinerja, dari 75 responden sebanyak 37 responden yang menjawab sangat setuju (SS) dengan pernyataan ini, sebanyak 34 responden yang menjawab setuju (S) sebanyak 2 responden yang menjawab netral (N) dengan pernyataan tersebut dan sebanyak 2 responden menjawab tidak setuju (TS) dengan pernyataan tersebut. Sehingga rata-rata jawaban menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa kejelasan sasaran anggaran pada satuan kerja.

Pada pernyataan kedua variabel Y yaitu pemerintah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan, dari 75 responden sebanyak 37 responden yang menjawab sangat setuju (SS) dengan pernyataan ini, sebanyak 36 responden yang menjawab setuju (S) sebanyak 1 responden yang menjawab netral (N) dengan pernyataan tersebut dan sebanyak 1 responden menjawab tidak setuju (TS) dengan pernyataan tersebut. Sehingga rata-rata jawaban menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa pemerintah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Pada pernyataan ketiga variabel Y yaitu pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dari 75 responden sebanyak 30 responden yang menjawab sangat setuju (SS) dengan pernyataan ini, sebanyak 43 responden yang menjawab setuju (S), sebanyak 1 responden yang menjawab netral (N) dengan pernyataan tersebut dan sebanyak 1 responden menjawab tidak setuju (TS) dengan pernyataan tersebut. Sehingga rata-rata jawaban menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada pernyataan keempat variabel Y yaitu pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dari 75 responden sebanyak 44 responden yang menjawab sangat setuju (SS) dengan pernyataan ini,

sebanyak 30 responden yang menjawab setuju (S) dengan pernyataan tersebut dan sebanyak 1 responden yang menjawab netral (N) dengan pernyataan tersebut. Sehingga rata-rata jawaban menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pada pernyataan kelima variabel Y yaitu pengelolaan APBD dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan kepada masyarakat luas, dari 75 responden sebanyak 30 responden yang menjawab sangat setuju (SS) dengan pernyataan ini, sebanyak 27 responden yang menjawab setuju (S) dengan pernyataan tersebut dan sebanyak 18 responden yang menjawab netral (N) dengan pernyataan tersebut. Sehingga rata-rata jawaban menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa pengelolaan APBD dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan kepada masyarakat luas.

Dari kelima pernyataan dalam kuesioner penelitian pada variabel Y, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden yaitu sebanyak 75 orang responden menjawab sangat setuju (SS) dengan pernyataan dalam kuesioner penelitian yang dijawab oleh responden terkait dengan kejelasan sasaran anggaran.

c. Analisis statistik deskriptif

Pada analisis statistic deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik variabel pada penelitian. Adapun bagian analisis statistic deskriptif yaitu, nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum.

Tabel 4. 4 Hasil Statistik Deskriptif

N		Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Kejelasan Sasaran Anggaran	75	16	25	22,71	2,454
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	75	14	25	21,77	2,699
Valid N (Listwise)	75				

Sumber : Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa pada penelitian ini terdapat 2 variabel dengan jumlah sampel sebanyak 75. Pada variabel kejelasan sasaran anggaran (X) memiliki nilai minimum yaitu 16, nilai maksimum yaitu 25, nilai rata-rata yaitu 22,71 dengan penyebaran rata-rata atau simpangan baku sebesar 2,454. Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y) memiliki nilai minimum yaitu 14, nilai maksimum yaitu 25, nilai rata-rata yaitu 21,77 dengan penyebaran rata-rata atau simpangan baku sebesar 2,699.

c. Uji kualitas data

1. Uji Validitas

Untuk mengukur valid atau tidak data yang diolah maka dilakukan pengujian validitas data dengan membandingkan nilai r hitung dan r tabel setiap butir pertanyaan pada masing-masing variabel. Apabila r hitung > r tabel (dengan signifikansi 0,05) maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Untuk mengukur nilai r tabel pada penelitian ini dengan N = 75 dengan taraf signifikansi 5%.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Kejelasan Sasaran Anggaran (X)

No Item	R-Hitung	R-Tabel (Taraf Sig. 5%)	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	0,835	0,227	0,000	Valid
2	0,928	0,227	0,000	Valid
3	0,902	0,227	0,000	Valid
4	0,922	0,227	0,000	Valid
5	0,841	0,227	0,000	Valid

Sumber : Output SPSS, 2023

Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y)

No Item	R-Hitung	R-Tabel (Taraf Sig. 5%)	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	0,833	0,227	0,000	Valid
2	0,875	0,227	0,000	Valid
3	0,883	0,227	0,000	Valid
4	0,887	0,227	0,000	Valid
5	0,804	0,227	0,000	Valid

Sumber : Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel diatas yaitu tabel 4.5 dan 4.6 diatas menunjukkan bahwa hasil analisis dari variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X) dan variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y) memiliki nilai r-hitung yang diperoleh dari perhitungan statistik lebih besar dari nilai r-tabel ($r_{hitung} > r_{tabel}$). Hasil ini menunjukkan bahwa item-item pernyataan pada setiap variabel dapat dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Suatu pernyataan dikatakan reliable jika jawaban atau hasil pernyataan tersebut akurat dan konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner sebagai indikator dari variabel dalam penelitian ini. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach's Alpha*

dengan kriteria semakin besar nilai alpha ($>0,60$) maka data dinyatakan reliable atau konsisten.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	N of item	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran (X)	0,931	5	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y)	0,898	5	Reliabel

Sumber : Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, menunjukkan bahwa hasil uji dari setiap variabel dinyatakan reliable. Hasil uji teknik *Cronbach Alpha* dari masing-masing variabel, yaitu kejelasan sasaran anggaran (X) sebesar 0,931 dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y) sebesar 0,898. Hal ini berarti masing-masing nilai *Cronbach Alpha* menghasilkan nilai lebih besar dari kriteria nilai alpha ($0,931 > 0,60$), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data atau butir-butir pernyataan dari setiap variabel dalam penelitian ini dinyatakan konsisten dan reliabel.

d. Analisis Regresi Linear Sederhana

Adapun uji regresi linear sederhana digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen sesuai dengan hipotesis yang diajukan sebelumnya.

1. Uji Determinasi (R Square)

Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel X (Kejelasan Sasaran Anggaran) dan Y (Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan), peneliti melakukan analisis dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana menggunakan bantuan *SPSS*. Setelah dilakukan analisis regresi linear sederhana diperoleh output di bawah ini.

Koefisien determinasi (*R Square*) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen (Kejelasan sasaran anggaran) mampu menjelaskan variabel dependen (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan). Berikut ini hasil uji determinasi (*R Square*).

Tabel 4. 8 Hasil Uji Determinasi (Model Summary)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.561 ^a	.315	.305	2.249

a. Predictors: (Constant), Kejelasan Sasaran Anggaran

Sumber : Output *SPSS*, 2023

Berdasarkan tabel hasil uji determinasi model summary diatas, diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,561 (56,1%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (Kejelasan sasaran anggaran) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan) sebesar 56,1%. Sedangkan 43,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Adapun untuk melihat letak kuadran nilai korelasi tersebut, dapat dilihat pada tabel dibawah ini (Neolaka, 2014).

Tabel 4. 9 Interpretasi Nilai R

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00	Tidak ada korelasi
> 0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 0,99	Sangat Kuat
1,00	Korelasi sempurna

Dari tabel interpretasi r di atas membuktikan pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan berada pada interval koefisien yaitu $0,40 - 0,599$ dan interpretasinya masuk dalam kategori sedang.

2. Uji Anova

Tabel 4. 10 Hasil Uji Anova

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	169.752	1	169.752	33.546	.000 ^a
	Residual	369.395	73	5.060		
	Total	539.147	74			

a. Predictors: (Constant), Kejelasan Sasaran Anggaran

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Sumber : *Output SPSS, 2023*

Pada tabel diatas menjelaskan apakah terdapat pengaruh yang nyata (signifikan) variabel X terhadap variabel Y. Dari output diatas terlihat bahwa F hitung 33,546 dengan tingkat signifikansi probabilitas $0,000 < 0,005$, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel partisipasi.

e. Uji hipotesis

Dari analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan aplikasi *SPSS* diperoleh output hasil persamaan regresi linear sederhana berikut ini.

Tabel 4. 11 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.758	2.434		3.188	.002
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.617	.107	.561	5.792	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Sumber : *Output SPSS, 2023*

Pada tabel 4.11 diatas, diketahui nilai koefisien dari persamaan regresi linear sederhana berikut.

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

X = Kejelasan Sasaran Anggaran

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Dari tabel *output* hasil persamaan regresi linear sederhana coefficients didapatkan persamaan regresi berikut:

$$Y = 7,758 + 0,617 X$$

Perubahan diatas merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negatif. Dari koefisien-koefisien persamaan regresi linear sederhana di atas, diketahui konstan sebesar 7,758 menunjukkan bahwa jika variabel kejelasan sasaran anggaran bernilai nol atau tetap maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebesar 7,758%. Variabel kejelasan sasaran anggaran 0,617 menunjukkan bahwa jika variabel kejelasan

sasaran anggaran meningkat 1 satuan maka akan meningkat akuntabilitas pengelolaan keuangan sebesar 0,617 satuan atau sebesar 61,7%.

Selain menggambarkan persamaan regresi output ini juga menampilkan uji signifikansi dengan uji t yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang nyata (signifikan) variable X (Kejelasan sasaran anggaran) terhadap variabel Y (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan).

Pada tabel *output* hasil persamaan regresi linear sederhana coefficients diatas, t_{hitung} kejelasan sasaran anggaran adalah 5,792. Dengan derajat bebas (df) = $N-2 = 75 - 2 = 73$, maka t_{tabel} sebesar 1,669.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,792 > 1,669$). Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dari hasil uji t pula, diketahui nilai sign. 0,000 lebih kecil dari 0,005 ($0,000 < 0,005$) yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang erat antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan BPKAD Kota Palopo.

4.3 Pembahasan

Hipotesis pada penelitian ini yaitu kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan BPKAD Kota Palopo. Hasil pengujian hipotesis pada uji t yang dilakukan menunjukkan nilai signifikan variabel kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu $0,000 < \alpha = 0,005$. Adapun nilai koefisien regresi pada variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,561 dan bernilai positif. Nilai koefisien regresi menunjukkan hubungan yang positif dan searah. Hal ini menunjukkan bahwa

variabel kejelasan sasaran anggaran pada BPKAD Kota Palopo memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan. Maka kesimpulannya H_a diterima dan H_0 ditolak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo sudah dijalankan dengan baik dan searah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Karena untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan diperlukan adanya kejelasan sasaran anggaran agar dapat mencapai tujuan-tujuan pelaksanaan tugas dari kantor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atikah Hasanah (2021) yang berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan). Hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas (Hasanah, 2021).

Adapun penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2023), dengan judul penelitian “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Handayani, 2023).

Sedangkan penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hafzhan (2021), dengan judul penelitian “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntabilitas dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)” . Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Hafzhan, 2021).

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo, maka dapat diambil kesimpulan yaitu kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan BPKAD Kota Palopo. Hal ini dapat dilihat pada pengujian hipotesis pada uji t yang dilakukan menunjukkan nilai signifikan variabel kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu $0,000 < \alpha = 0,005$. Adapun nilai koefisien regresi pada variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,561 dan bernilai positif. Nilai koefisien regresi menunjukkan hubungan yang positif dan searah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu dalam menganalisis data yang diperoleh sangat diperlukan ketelitian agar terhindar dari kesalahan pengolahan data.

5.3 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut.

1. Implikasi Teoritis

Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas keuangan, maka digunakan kuesioner sebagai instrument penelitian. Setelah itu tahap skoring, lalu diuji validitas dan reliabilitasnya. Dari hasil uji validitas dan uji reliabilitas, data penelitian dinyatakan valid dan reliabel. Sehingga data dianalisis menggunakan analisis regresi linear sederhana. Maka berdasarkan hasil analisis data, diperoleh bahwa kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo. Membenahi diri sehubungan dengan pengelolaan keuangannya.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan pada penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut.

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo diharapkan agar selalu berupaya untuk terus mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan peningkatan dan memaksimalkan kejelasan sasaran anggaran.

2. Bagi pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo diharapkan agar selalu berupaya memperhatikan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan sebaiknya menambahkan variabel penelitian diluar dari variabel yang telah diteliti oleh peneliti agar dapat mengembangkan penelitiannya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu disarankan untuk menambahkan referensi yang lebih banyak lagi dan memperluas objek penelitiannya seperti pada sektor swasta atau sektor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, D. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Vol. 9 No.*
- Asliyanti. (2015). *Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Aksesibilitas dalam Menciptakan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.* Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Gibor, N. Y. El. (2021). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Transparansi Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Klaten.* Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hafzhan, M. (2021). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan).* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Handayani, R. P. (2023). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Lampung Utara).* Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Hasan, N. A. (2017). *Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.* Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hasanah, A. (2021). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan).* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Hawalya, N. (2023). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.* Universitas Bosowa.
- Indria, N. A. (2018). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nanincova, N. (2019). *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Noach Cafe And Bistro.* 7(2).
- Neolaka, A. (2014). *Metode Penelitian dan Statistik (Edisi Ke-1).* PT. Remaja Rosda Karya.
- Nurfadilah, Y. (2022). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan*

Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta, Vol 4, No.*

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarni, N. (2019). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Umar, H. (2019). *Metode Riset Manajemen Perusahaan : Langkah Cepat dan Tepat Menyusun Tesis dan Disertasi*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Vidyasari, F. N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Vol 10, No.*
- Yudianto, T. dan A. (2021). *Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas Vii Smp Negeri 2 Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu*. 2(1), 105–117.

